

ANALISIS DETERMINAN PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KUTAI KARTANEGERA

Rayana Nur Dwi Wahyu¹⁾, Marwanto²⁾, Noor Fachman³⁾, La Ode Hasiara⁴⁾, Julius Gessong Sampeallo⁵⁾, Fauziah Lilly Anggraeni S⁶⁾

[rayanadwi2803@gmail.com^{1\)}](mailto:rayanadwi2803@gmail.com), [marwanto@polnes.ac.id^{2\)}](mailto:marwanto@polnes.ac.id), [fachmannoor@gmail.com^{3\)}](mailto:fachmannoor@gmail.com),
[hasiara@polnes.ac.id^{4\)}](mailto:hasiara@polnes.ac.id), [yuliusgessong@gmail.com^{5\)}](mailto:yuliusgessong@gmail.com), [fauziahlilyas@polnes.ac.id^{6\)}](mailto:fauziahlilyas@polnes.ac.id)

123456) Jurusan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang, Samarinda 75131

Abstract

The objective of this study is to examine the influence of Taxpayer Awareness, Income Level, Tax Sanctions, and Fiscal Services on Taxpayer Compliance in the payment of motor vehicle taxes at the SAMSAT Office of Kutai Kartanegara. This research adopts a quantitative descriptive approach utilizing primary data collected through the distribution of structured questionnaires. The population of the study comprises all registered motor vehicle taxpayers, totaling 586,460 individuals. Total of 400 respondents were selected using a purposive sampling technique based on specific criteria relevant to the research objectives. The data were analyzed using multiple linear regression analysis. The findings reveal that Taxpayer Awareness and Tax Sanctions have a positive and statistically significant effect on Taxpayer Compliance. In contrast, Income Level and Fiscal Services do not exert a statistically significant influence on Taxpayer Compliance. These results indicate that efforts to enhance taxpayer compliance should prioritize increasing taxpayer awareness and strengthening the enforcement of tax sanctions. Efforts to raise taxpayer awareness can be achieved through routine monthly Motor Vehicle Tax outreach through offline and online media. Tax sanctions are enforced through administrative fines imposed on taxpayers who fail to pay their Motor Vehicle Tax by the deadline

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Income Level, Tax Officer Services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 586.460 objek pajak, dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu, variabel Tingkat Penghasilan dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat difokuskan pada peningkatan kesadaran dan penegakan sanksi perpajakan. Upaya peningkatan kesadaran untuk wajib pajak dapat ditempuh dengan sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan rutin setiap bulan melalui media off line dan online. Penegakan sanksi perpajakan dilakukan dengan memberi sanksi administratif berupa denda yang dikenakan untuk wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai batas waktu yang diberikan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Pelayanan Fiskus

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memiliki kewenangan dalam mengelola pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat tujuh jenis pajak Sosial Ekonomi dan Bisnis



9 772722 932006



9 772722 932006

yang dikelola oleh pemerintah provinsi, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, dan menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di Provinsi Kalimantan Timur, Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Berdasarkan data Sistem Satu Data Kalimantan Timur, pada tahun 2024 penerimaan dari PKB mencapai Rp1.419.943.632.225 atau sekitar 16,6% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp8.552.772.605.576. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu penyumbang pajak daerah dengan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar Rp157.881.830.299 atau 85,85% dari target Rp183.898.000.000 (UPTD PPRD Kutai Kartanegara, 2024).

Meskipun nilai penerimaan tersebut cukup tinggi, namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB masih tergolong rendah. Selama lima tahun terakhir, proporsi kendaraan yang membayar pajak tidak mencapai 40%. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Kepatuhan wajib pajak membayar PKB di SAMSAT Kutai Kartanegara

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan Yang Membayar Pajak	Jumlah Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak	Tingkat Pembayaran %
2020	450.034	178.356	271.678	39.63%
2021	475.240	171.210	304.030	36.03%
2022	506.848	187.418	319.430	36.98%
2023	549.683	213.186	336.497	38.78%
2024	586.460	227.871	358.589	38.86%

Sumber: UPTD PPRD Wilayah Kutai Kartanegara

Tabel di atas menunjukkan meskipun jumlah kendaraan terus bertambah, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2021 merupakan titik terendah dengan tingkat kepatuhan hanya 36,03%, sedangkan tahun 2020 adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan capaian 39,63%. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kepatuhan perpajakan, baik dari sisi kesadaran masyarakat maupun efektivitas pelayanan.

Menanggapi rendahnya tingkat kepatuhan tersebut, berbagai kebijakan telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu kebijakan awal adalah evaluasi terhadap standar pelayanan di Kantor SAMSAT. Penelitian oleh Praja (2017) menemukan bahwa pelayanan secara umum sudah cukup baik, namun masih ditemukan praktik percaloan yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan. Sebagai tindak lanjut, SAMSAT menyediakan layanan pengaduan, penindakan terhadap oknum, dan perbaikan internal.

Pada tahun 2021, inovasi berbasis digital diperkenalkan melalui peluncuran aplikasi E-Samsat Bhabinkamtibmas, yang dikembangkan bekerja sama antara Polres Kutai Kartanegara dan pemerintah daerah. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak membayar PKB secara daring. Mengingat tingkat literasi digital Sosial Ekonomi dan Bisnis



masyarakat yang beragam, maka sosialisasi dilakukan melalui personel Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak edukasi kepada masyarakat. Pada tahun 2023, diluncurkan program Samsat Ekstra, yaitu layanan pembayaran pajak yang dibuka pada hari libur untuk menjangkau wajib pajak yang tidak sempat membayar pada jam kerja. Program ini juga memberikan berbagai insentif, seperti diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pengurangan tunggakan pajak progresif. Terakhir, pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, yang awalnya dijadwalkan berlangsung dari 12 Agustus hingga 12 September 2024, kemudian diperpanjang hingga 31 Oktober 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan, sekaligus meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah secara signifikan (<https://news.ddtc.co.id>).

Berbagai kebijakan dan inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun demikian, efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut perlu dianalisis lebih dalam, terutama untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah kuantitatif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan statistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Comperative Research*. Menurut Bahri (2018) menjelaskan *Comperative Research* adalah jenis penelitian yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab dan akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat serta mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data tertentu, dengan tujuan membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain. Pada penelitian ini *Causal Comparative research* digunakan penulis untuk mempelajari alasan atau penyebab yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Populasi

Menurut Bahri (2018) populasi merupakan wilayah secara umum meliputi obyek atau subyek dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti dalam mempelajari dan diambil kesimpulan, populasi tidak hanya individu, namun bisa juga bersifat benda-benda. Populasi penelitian ini adalah unit potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yaitu berjumlah 586.460 wajib pajak.

Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah populasi yang diambil sebagian untuk menjadi sumber data penelitian dan dapat dikatakan sudah mewakili populasi tersebut. Adapun sampel penelitian ini adalah unit Sosial Ekonomi dan Bisnis



potensi wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yaitu berjumlah 400 responden. Adapun cara dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling* yakni berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai tujuan penelitian. Untuk kriteria terdapat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2
Kriteria Responden

No	Kriteria
1	Wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yang terdaftar di kantor layanan SAMSAT Kutai Kartanegara.
2	Wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yang terdaftar lebih dari 1 tahun.

Sumber : data diolah (2025)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah penyebaran angket atau kuesioner, kuesioner yang dibagikan kepada responden diukur dengan skala likert lima titik pengukuran. Metode pengumpulan data yang diterapkan berupa data primer, Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Menurut Bahri (2018) Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Empat Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- a = Konstanta
- $b_1 b_2 b_3$ = Koefisien Regresi
- x_1 = Kesadaran Wajib Pajak
- x_2 = Sanksi Perpajakan
- x_3 = Tingkat Penghasilan
- x_4 = Pelayanan Fiskus
- e = Eror

Pengujian Kualitas Data

- Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) mendefinisikan uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk



mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Untuk mengetahui hasil uji validitas, dapat diketahui apabila r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka indikator tersebut valid.

- **Uji Reliabilitas**

Peneliti menggunakan SPSS untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha (a)*. Dasar dalam mengambil keputusan hasil uji reliabilitas menurut Sugiyono (2019) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Cronbach's Alpha (α)* < 0,6 maka kuesioner dinyatakan kurang reliabel.
- b. Jika nilai *Cronbach's Alpha (α)* > 0,6 dan mendekati 1, maka kuesioner dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

- **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* untuk mengetahui dalam model regresi menyebar normal atau tidak. Adapun kriteria pengujian normalitas apabila probabilitas >0,05 maka berdistribusi normal dan jika probabilitas <0,05 maka berdistribusi tidak normal.

- **Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghazali (2018) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation factor*). Nilai *cut off* yang umum digunakan dalam mendeteksi adanya multikolinearitas adalah tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10.

- a. Dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10.
- b. Dapat diindikasikan bahwa terjadi multikolinearitas, jika nilai *tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10.

- **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghazali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park. Adapun kriteria pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji park adalah jika probabilitas > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan jika probabilitas < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

- **Uji Koefisien Korelasi R**

Menurut Sugiyono (2019) analisis koefisien korelasi r adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0



sampai 1, jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah.

- **Koefisien Determinasi**

Menurut Sugiyono (2019) uji koefisien determinasi merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, untuk nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, jika nilai koefisien determinasi mendekati satu, berarti variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh variasi pada variabel dependen.

- **Uji T**

Menurut Sugiyono (2019) uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen, dan uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen, t hitung kemudian dibandingkan dengan t tabel dengan taraf kesalahan 5% dengan uji dua pihak dan derajat kebebasan (dk) yang besarnya ialah $n-2$.

- **Uji F**

Menurut Ghazali (2018) uji f digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, untuk mengukur uji f dapat dinilai dari $f_{hitung} > f_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya bila $f_{hitung} < f_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi linear berganda tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas memiliki tujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sebelum data dianalisis lebih lanjut, dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen. Kedua uji ini menjadi dasar untuk memastikan instrumen yang digunakan layak dan mampu merepresentasikan variabel penelitian secara akurat dan konsisten.

- **Uji Validitas**

Hasil pengujian Validitas data disajikan dalam tabel 1.3 berikut



Tabel 1.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,734	0,098	Valid
	X1.2	0,720	0,098	Valid
	X1.3	0,755	0,098	Valid
	X1.4	0,798	0,098	Valid
	X1.5	0,674	0,098	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,747	0,098	Valid
	X2.2	0,826	0,098	Valid
	X2.3	0,851	0,098	Valid
	X2.4	0,821	0,098	Valid
Tingkat Penghasilan	X3.1	0,852	0,098	Valid
	X3.2	0,802	0,098	Valid
	X3.3	0,699	0,098	Valid
Pelayanan Fiskus	X4.1	0,746	0,098	Valid
	X4.2	0,807	0,098	Valid
	X4.3	0,784	0,098	Valid
	X4.4	0,804	0,098	Valid
	X4.5	0,764	0,098	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,667	0,098	Valid
	Y.2	0,757	0,098	Valid
	Y.3	0,779	0,098	Valid
	Y.4	0,721	0,098	Valid
	Y.5	0,782	0,098	Valid

Sumber : data primer diolah (2025)

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pernyataan kuesioner yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

• Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas data disajikan dalam tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,784	Realible
2	Sanksi Perpajakan (X_2)	0,827	Realible
3	Tingkat Penghasilan (X_3)	0,690	Realible
4	Pelayanan Fiskus (X_4)	0,839	Realible
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,793	Realible

Sumber : data primer diolah (2025)

Sesuai dengan data yang disajikan dalam tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel $> 0,6$ atau nilai semua *cronbach's alpha* variabel bernilai lebih besar di bandingkan nilai kritis. Bisa disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik.

Uji Asumsi Klasik



Sebelum melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik. Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

- Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Metode ini dipilih karena bersifat umum, mudah diterapkan, dan mampu memberikan informasi yang lebih rinci mengenai distribusi data. Nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* yang ditunjukkan melalui *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,065, yang berada di atas batas signifikansi 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

- Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen). Nilai *tolerance* yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10 dan Nilai *VIF* < 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

- Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Park, diketahui bahwa nilai probabilitas seluruh variabel independen berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas.

Tabel 1.5
Rekapitulasi Hasil Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.670	.797		7.117	.000		
Kesadaran Wajib Pajak	.237	.047	.253	5.000	.000	.449	2.228
Sanksi Perpajakan	.550	.053	.490	10.298	.000	.506	1.976



Tingkat Penghasilan	.052	.056	.040	.933	.352	.633	1.580
Pelayanan Fiskus	.047	.034	.055	1.394	.164	.731	1.368

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer diolah (2025)

Berdasarkan dari tabel 1.5 menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah:

$$Y_{Kepatuhan\ Wajib\ Pajak} = 5,670 + 0,237 X_1 + 0,550 X_2 + 0,052 X_3 + 0,047 X_4$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), tingkat penghasilan (X_3), dan pelayanan fiskus (X_4) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.6
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.739 ^a	.547	.542	1.67673

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Tingkat Penghasilan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer diolah (2025)

Berdasarkan pada tabel 1.6 hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan pada Tabel *Model Summary*, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,739, yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen.

Pengujian Hipotesis

Model regresi yang telah diperoleh perlu diuji terlebih dahulu, baik secara simultan maupun parsial. Pengujian secara simultan dilakukan menggunakan uji F atau ANOVA, sedangkan pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji T.

- **Hasil Uji F**

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yakni variabel kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), tingkat Penghasilan (X_3), dan pelayanan fiskus (X_4), memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 1.7
Hasil Uji F



ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1338.282	4	334.570	119.004	,000 ^b
Residual	1110.508	395	2.811		
Total	2448.790	399			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Tingkat Penghasilan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : data primer diolah (2025)

Menggunakan bantuan software SPSS, tabel 1.7. menunjukkan hasil variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan output ANOVA, diperoleh nilai f hitung sebesar 119,004 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 400 responden, sehingga diperoleh nilai f tabel sebesar 2,39. Dari hasil hitung dapat dilihat f hitung lebih besar dari f tabel ($119.004 > 2,39$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, secara bersama-sama variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- **Hasil Uji T**

Uji T dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berbentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Informasi lebih rinci terkait hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.8
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5.670	.797		7.117	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.237	.047	.253	5.000	.000
Sanksi Perpajakan	.550	.053	.490	10.298	.000
Tingkat Penghasilan	.052	.056	.040	.933	.352



Pelayanan Fiskus	.047	.034	.055	1.394	.164
---------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 1.8 uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, yaitu kepatuhan wajib pajak. Pengujian ini mengacu pada nilai t hitung yang diperoleh dari output regresi, dan dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) sebesar 395 ($n = 400$, $k = 4$). Berdasarkan distribusi tabel t, nilai t tabel pada $df = 395$ adalah 1,966. Berikut adalah uraian hasil pengujian untuk masing-masing variabel:

1. Hasil Uji Pengaruh Variabel Kesadaran Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan hasil output, nilai t hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 5,000, dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 0,000. Karena nilai t hitung (5,000) lebih besar dari t tabel (1,966) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diterima, atau hipotesis 1 diterima.

2. Hasil Uji Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 10,298, dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,000. Karena nilai t hitung (10,298) jauh lebih besar dari t tabel (1,966) dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diterima, atau hipotesis 2 diterima.

3. Hasil Uji Pengaruh Variabel Tingkat Penghasilan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Nilai t hitung untuk variabel tingkat penghasilan diperoleh sebesar 0,933, dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 0,352. Karena nilai t hitung (0,933) lebih kecil dari t tabel (1,966) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian,



hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ditolak, atau hipotesis 3 ditolak.

4. Hasil Uji Pengaruh Variabel Pelayaan Fiskus (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil output regresi menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel pelayanan fiskus adalah sebesar 1,394, dengan tingkat signifikansi (sig.) sebesar 0,164. Karena nilai t hitung (1,394) lebih kecil dari t tabel (1,966) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ditolak, atau hipotesis 4 ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Analisis determinan pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kutai Kartanegara maka ditarik kesimpulan:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan pendapatan pajak dari tahun sebelumnya.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga jumlah unit kendaraan yang membayar pajak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dikarenakan tingkat penghasilan bukan merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, adapun faktor lain, seperti kesadaran wajib pajak dan persepsi terhadap sanksi perpajakan, memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal tersebut disebabkan pelayanan fiskus yang diberikan oleh petugas pajak belum mampu mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya pelayanan fiskus dapat ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi yang lebih intensif terkait kewajiban pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.



5. Berdasarkan hasil penelitian jika kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat penghasilan, dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kutai Kartanegara.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran yang disampaikan, adapun saran yang diberikan penulis adalah:

1. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak sebaiknya difokuskan pada peningkatan edukasi, penyuluhan, serta penegakan aturan dan sanksi secara konsisten.
2. Penulis selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan spesifik mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R. (2021). *Ekonomi Publik*. (Fadhil Ridwan, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Khalimi. (2022). *Hukum Pajak dan Kepabean Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (1st ed.). Yogyakarta: Andi.

Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Purwitasari, A., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666. Retrieved from <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>

Rahayu. (2017). *Perpajakan Mengenal Perpajakan*. Jakarta: Magic Entertainment.

Rantung, R. L., Posumah, J. H., & Ogotan, M. (2015). Sekilas tentang Etika Lingkungan. *Jap*, 3(031), 2–7.

Palupi, N. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Paerpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Kabupaten Purbalingga Dengan Kesadarab Perpajakan Sebagi Variabel Intervening, 1–121.



Praja, S. A. (2017). Pelaksanaan Standar Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Upt Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 5(2), 103. <https://doi.org/10.52239/jar.v5i2.842>

Sari, Permata Ayu, V. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 6.

Setyawati, A. (2020). *Teori Organisasi Konsep Dan Implementasinya*. (A. Sudirman, Ed.). Bandung: CV.Media Sains Indonesia.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Sutopo, Ed.) (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.

Widi, G., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(02), <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6561>



9 772722 932006